

Reproduksi Kekuasaan Kyai Dan Blater Di Kabupaten Bangkalan

Ishaq Abdussalam

Prodi Sosiologi FISIB Universitas Trunojoyo Madura

ABSTRACT

In Madurese culture, Kiai symbolized as someone who has a deep knowledge of religion, he is also believed as a representative prophet on earth. Discourse knowledge *sami'nawa atho'na* is a manifestation of how the figure of Kiai has a sacred meaning for the people of Madura, so that the words and actions become a patron who always followed by the public. While Blater pointing to things that dimension of violence, carok is the domain that cannot be separated with the blater. For those carok is the best way to go if their self-esteem feels to be harassed. So this blater group respected by the community and tend to be feared because of the courage and strength.

Kiai and blater in local politics of Madura are often used as a means of seizing power. This study seeks to unpack the phenomenon, such as: want to reveal the use of symbols of religious ideology (kiai) as a strategy to influence and attract the sympathy of the masses in Bangkalan elections 12-12-2012, and uncover strategies of blater is means power presses and organizing the masses in Bangkalan elections.

This study uses a critical paradigm approach to dismantle the relations of the power that inherent in the reality studied. Critical paradigm was chosen because it is believed that the reality of the struggle for power in Bangkalan elections involves cultural and political power and the economy. This paradigm always sees that reality for med over these relations.

The results of this study are: a) all the symbols and identities attached to kiai used as a strategy for hegemony community by Bangkalan regent candidates. The candidates fight the owner of kiai Kholil identity to attract the sympathy of the masses, because they still have a blood descendant of kiai Kholil that was very influential in Bangkalan. b) The relation of kiai-students is an effective means of gaining support from the district level till to the villages. c) While blaterisme strategy covers two things. *First*, structural blaterisme and the *Second*, blaterisme non-structural.

Key Word: Power, Kiai, Violence.

PENDAHULUAN

Studi ini mengkaji tentang kiai dan blater dalam meraih kekuasaan dengan strategi penggunaan simbol-simbol ideologi agama (kiai) serta kekerasan dalam politik terutama sejak era reformasi. Fenomena ini selalu mengiringi dinamika politik baik di tingkat daerah maupun nasional. Para elit politik yang hendak maju untuk menduduki jabatan tertentu, sering menjadikan simbol agama dan sejenisnya

sebagai komoditas maupun daya tawar diri mereka agar dipilih oleh konstituennya. Namun, sejak tumbangnya kekuasaan Orde Baru dan kran demokrasi dibuka, penggunaan simbol-simbol agama menjadi marak dan bermunculan partai-partai yang menasbihkan diri mereka sebagai partai pembawa misi ke-Tuhanan. Hal ini menjadi fenomena yang menghiasi perpolitikan daerah dan nasional dalam setiap prosesi pemilu.

Ja'far (2014), memandang ada dua hal yang lekat dengan isu-isu agama sebagai komoditas politik di Indonesia pasca Orde Baru: pertama, dengan menegaskan afiliasi politiknya terhadap sebuah ajaran agama tertentu sebagai basis ideologisnya. Kedua, partai politik dapat mewacanakan soal agama, namun dengan cara menegaskan prinsip non-afiliasinya terhadap suatu agama tertentu atas dasar pluralitas agama.

Sudah diketahui bersama jika masyarakat atau penduduk Indonesia sebagian besar muslim, terutama masyarakat pulau Jawa, tokoh agama seperti kiai mampu menentukan arah politik, karena kiai mempunyai basis massa yang kuat, loyal dan keberadaan kiai tidak hanya dipercaya sebagai pembimbing hidup. Akan tetapi, bagi sebagian umat yang taat, kiai juga dipercaya sebagai pembimbing di akhirat kelak. Di Jawa, sebagaimana kajian Geertz (1965) dan Mansoor (1990) membuktikan bahwa kiai mempunyai peran yang begitu vital dalam membangun masyarakat, menggerakkan massa, bahkan sikap politik kiai selalu diikuti oleh masyarakat di sekitarnya.

Kharisma kiai begitu besar dalam budaya masyarakat Indonesia lebih-lebih di pulau Madura khususnya kabupaten Bangkalan, tidak heran apabila kiai menjadi magnet politik yang sering didekati oleh elit politik agar mendapat legitimasi dari masyarakat di satu sisi, di sisi lain marak pula dari kalangan kiai di beberapa daerah yang terjun langsung ke dalam arena politik praktis, seperti yang terjadi di Madura. Otoritas tradisional yang kiai punya, meminjam istilah Jackson (1973) menjadi modal sosial politik yang menguntungkan sehingga banyak dari kalangan kiai ini mudah

menduduki jabatan politik tertentu dalam pemilu. Menyimak peran kiai dalam dinamika sosial politik dewasa ini, ada dua hal yang sering ditemui, pertama, kiai menjadi alat legitimasi elit politik, dalam arti meminta dukungan berupa fatwa atau rekomendasi (*backing*) agar sang calon mudah diterima masyarakat. Hal lain kenapa kiai terjun ke dunia politik praktis kiai karena umumnya mereka telah mempunyai massa dengan jumlah yang tidak sedikit. Fenomena ini banyak terjadi di beberapa daerah Indonesia khususnya Madura (Bangkalan).

Pada era reformasi yang disebut sebagai era demokrasi, terutama sejak menganut sistem pemilihan langsung, sesungguhnya secara substansial tidak berbeda dengan era orde baru. Pertarungan politik di era demokrasi, para elit atau kandidat yang hendak maju memperebutkan kekuasaan, seharusnya bertarung lewat program-program politik yang dapat diterima dan menjawab persoalan masyarakat. Namun, realitas politik justru lebih banyak dihiasi oleh pencitraan yang kadangkala tidak ada hubungannya dengan bagaimana membangun daerah atau negara. Konkretnya, di Madura, kandidat legislatif dan eksekutif yang berkompetisi umumnya memperebutkan pengaruh kiai, misalnya memasang foto salah seorang kiai yang paling berpengaruh atau *platform* serupa dalam kampanye politiknya sebagai upaya menggiring, mengkonstruksi masyarakat bahwa sang calon didukung oleh ulama besar yang berpengaruh. Realitas tersebut memberikan makna bahwa jika pada era otoritarianisme orde baru, masyarakat digiring lewat kekuatan militer agar memilih sebagaimana yang dikehendaki oleh kekuasaan. Namun kini, penggiringan

massa muncul dalam bentuknya yang baru, yakni lewat simbol-simbol ideologis yang menjadi kepercayaan masyarakat sehari-hari. Apabila masyarakat tergiring untuk memilih pasangan tertentu karena program politik para kandidat yang dapat diterima secara rasional, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai roda demokrasi berjalan dengan baik, tetapi kondisi politik justru mengarah pada penggiringan lewat kharisma ketokohan yang lebih menonjol bukan dalam bidang politik.

Penggiringan massa dalam pemilu buapti melalui sarana simbol keziaian ternyata tidak cukup, ada sisi kekuatan lain untuk menggiring masyarakat yaitu blater. Tapi blater menggunakan cara penggiringan paksa lewat aksi-aksi kekerasan, meneror, intimidasi, dan sejenisnya dalam rangka pemenangan calon-calon tertentu dalam pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa kendatipun Indonesia pada umumnya telah mengalami perubahan sistem pemerintahan dari orde baru ke era reformasi belum sepenuhnya menghapus penggunaan kekerasan dalam politik, yang demikian ini sering ditemui dalam kepemimpinan dan pilkada di beberapa daerah seperti di kabupaten Bangkalan. Jasa-jasa premanisme, banditisme, dan jagoanisme kian marak dipergunakan oleh para elit politik. Jika pada masa orde baru cenderung dilakukan oleh aparatus negara seperti militer dan kepolisian untuk memastikan kemenangan partai penguasa, meskipun para militer dan kepolisian juga merekrut kalangan preman dan melatihnya untuk membantu proyek kesuksesan partai penguasa. Namun kini, kelompok kekerasan kian menonjol dan menjadi tangan-tangan elit dalam rangka memenangkan pemilihan,

dalam konteks ini politik kekerasan banyak dijalankan oleh kaum preman, jawara, jagoan, dan sejenisnya. Mereka biasa beroperasi sebagai mesin politik kaum elit politik.

Penggunaan ideologi agama dan kekerasan sebagai strategi meraih kekuasaan struktural politik merupakan kajian yang tidak dapat dipisahkan dalam nuansa politik di Indonesia, terutama realitas seperti ini sangat tampak dalam pilkada sebagai salah satu tolok ukur perpolitikan nasional. Untuk itu, studi ini fokus terhadap penggunaan sarana ideologi agama dan kekerasan sebagai strategi politik para elit untuk memenangkan pertarungan politik pada tingkat lokal di Bangkalan Madura. Lebih spesifik pada bagaimana ideologi agama dan kekerasan dioperasikan oleh kaum elit di Bangkalan dalam rangka memenangkan dan meraih legitimasi masyarakat dalam pemilihan bupati di Bangkalan.

Kiai sebagai simbol agamawan dan juga blater sebagai simbol kekerasan adalah fenomena yang mewarnai dinamika politik Bangkalan, keduanya bekerja pada dua ranah yang berbeda namun mempunyai hubungan yang erat. Keduanya merupakan kelompok elit yang menguasai di semua lini kehidupan masyarakat. Meskipun blaterisme dalam politik seringkali ditutup-tutupi karena keberadaannya dalam sistem pemerintahan demokrasi dianggap melawan sistem, namun sulit menolak fakta bahwa Blaterisme tetap bekerja di bawah permukaan sebagai salah satu kelompok yang menentukan arah politik di Bangkalan. Untuk itu, diskusi ini akan dibawa pada konteks dan dinamikan politik pemilihan bupati Bangkalan, mengingat fenomena pemilihan bupati di

Bangkalan adalah salah satu pilkada yang kontroversial dan diwarnai dengan berbagai gelombang protes hingga konflik antar pendukung calon, di mana sesama calon datang dari satu keluarga, yakni trah kiai Kholil sebagai salah satu kiai yang amat berpengaruh dalam sejarah Madura sehingga keturunannya masih dianggap sebagai tokoh agamawan yang mewarisi segala identitas dan simbol yang melekat pada diri kiai Kholil.

Pada tanggal 12 Desember 2012, telah ditentukan pemilihan bupati untuk periode jabatan 2013- 2018. Bupati yang berkuasa selama dua periode sejak 2003 hingga 2013, Fuad Amin Imran tidak bisa lagi mencalonkan diri karena terbentur oleh aturan bahwa seorang pemimpin hanya boleh berkuasa selama dua periode. Akibat terkendala regulasi politik tersebut, ia kemudian mendorong anaknya Makmon Ibnu Fuad untuk bertarung mempertahankan kekuasaannya. Ra Fuad biasa dikenal, merupakan keturunan Syaikhona Kholil, seorang tokoh ulama atau kiai terkemuka di Madura. Menurut Barton (2003) kiai Kholil adalah salah satu guru dari kiai Hasyim Asy'ari seorang pendiri NU di Indonesia. Maka tidak mengherankan jika Ra Fuad mampu mempertahankan kekuasaannya sebagai bupati Bangkalan, karena Ra Fuad mewarisi simbol dan identitas yang lahir dari kalangan kiai besar.

Mencermati latar belakang di atas, maka bagaimana kemudian penggunaan simbol dan ideologi agama (kiai) sebagai alat untuk mempengaruhi masyarakat dalam memilih calon bupati tertentu di pilkada Bangkalan dan apakah simbol agama bersinergi dengan "blaterisme" untuk memenangkan calon bupati dalam pilkada Bangkalan 12-12- 2012.

PERTARUNGAN MEREbut KEKUASAAN LEWAT SIMBOL-SIMBOL IDEOLOGI AGAMA DALAM PILKADA BANGKALAN 2012

A. Perang Hegemoni: Memperebutkan Trah Kiai Kholil Sebagai Upaya Menarik Simpati Massa dan Memukul Lawan

Perang hegemoni dalam pemilihan bupati Bangkalan tahun 2012 dimulai ketika keturunan-keturunan dari trah kiai Kholil memperebutkan kursi jabatan sebagai orang nomor satu di Bangkalan. Begitu besar pengaruh kiai Kholil bagi masyarakat Bangkalan meskipun mereka tidak mengenal dan hidup pada zamannya. Namun, nama Mbah Kholil yang dikenal oleh masyarakat menjadi kata benda yang terus hidup dan disimbolkan sebagai seorang tokoh ulama besar yang bukan saja dipercaya memberi kontribusi dalam membangun masyarakat Islam di Madura, tetapi juga diyakini mempunyai kekuatan ghaib yang digunakan untuk melindungi masyarakat dari segala marabahaya.

Wacana ini kemudian menjadi mitos yang terus-menerus mengkonstruksi orang hingga ke alam bawah sadar masyarakat Madura. Sehingga religiusitas masyarakat Bangkalan seakan tidak dapat dipisahkan dengan nama kiai Kholil. Simbol-simbol yang melekat dalam dirinya kemudian menjadi identitas yang melekat juga kepada keturunan-keturunannya. Bagi masyarakat yang masih kental dengan cara berpikir tradisional seperti di Madura, ketika jasad seorang yang ditokohkan dan dielu-lukan sebagai orang yang berjasa dalam hidup mereka telah tiada, maka ketokohan seseorang tersebut sering disematkan pada keturunan-keturunannya meskipun nama tokoh tersebut tetap menjadi simbol dan

pegangan hidup serta diteladani oleh masyarakat.

Perebutan kekuasaan politik di Bangkalan antar keturunan kiai Kholil pada pilkada tahun 2012 terjadi karena tidak ada distribusi kekuasaan di antara mereka. dinamika politik Bangkalan berubah ketika kekuasaan Soeharto Tumbang, dalam arti ketika era reformasi bergulir dan kran demokrasi terbuka lebar bagi semua, maka yang berkuasa hingga kini adalah keturunan kiai yang mempunyai pengaruh besar di Bangkalan. Dan keturunan kiai Kholil yang mendominasi hingga kini. Jika pada orde baru dalam sejarahnya adalah dari kalangan militer atau akademisi yang pro dengan Soeharto. Kekuasaan dari trah Kholil sendiri dimulai sejak tahun 2003, yakni pemilihan bupati pertama kali pasca reformasi. Ra fuad yang maju dan memenangkan pertarungan politik waktu itu. Namun sebelumnya dari keluarga besar kiai Kholil sendiri telah terjadi kesepakatan di antara mereka, khususnya antara Ra Fuad dan Ra Imam, karena keduanya adalah tokoh yang mempunyai kemampuan dalam bidang politik dan hal tersebut disaksikan oleh seluruh keluarga dan santri-santri kiai Kholil. Dalam keluarga kiai Kholil tersebut terjadi kesepakatan bahwa pada saat itu, Ra Fuad meminta maju untuk bertarung dan menduduki jabatan bupati Bangkalan, dan pada periode berikutnya agar Ra Imam yang maju sebagai calon dari keturunan kiai Kholil.

Menurut Gramsci bila kekuasaan hanya dicapai dengan mengandalkan kekuasaan memaksa, hasil nyata yang berhasil dicapai dinamakan "dominasi". Stabilitas dan keamanan memang tercapai, sementara gejolak perlawanan tidak terlihat karena rakyat memang tidak

berdaya. Namun hal ini tidak dapat berlangsung secara terus menerus, sehingga para penguasa yang benar-benar sangat ingin melestarikan kekuasaannya dengan menyadari keadaan ini akan melengkapinya dengan secara perlahan-lahan kalau perlu menggantikannya) dengan perangkat kerja yang kedua, yang hasil akhirnya lebih dikenal dengan sebutan "hegemoni". Dengan demikian supermasi kelompok (penguasa) atau kelas sosial tampil dalam dua cara yaitu dominasi atau penindasan dan kepemimpinan intelektual dan moral. Tipe kepemimpinan yang terakhir inilah yang merupakan hegemoni (Hendarto, 1993:74). Dengan demikian kekuasaan hegemoni lebih merupakan kekuasaan melalui "persetujuan" (*konsensus*), yang mencakup beberapa jenis penerimaan intelektual atau emosional atas tatanan sosial politik yang ada.

B. Strategi Mobilisasi Massa Melalui Jaringan Kekuasaan Kiai

Jaringan kekuasaan kiai dalam ranah sosial kemasyarakatan adalah modal politik yang begitu besar dan menentukan kemana dukungan diarahkan, sebab ia mempunyai kekuatan memandu orang kalau tidak ingin mengatakan "menghipnotis" masyarakat hingga ketingkat akar rumput. Menurut Turmudi (2004: 63) dalam proses pemilihan Kepala Daerah secara langsung, kiai yang merupakan bagian dari rakyat mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Mereka mempunyai kemampuan untuk memainkan peran dan pengaruhnya karena mempunyai keunggulan-keunggulan yang melekat pada dirinya, mereka dapat mengelola dan mengendalikan cabang kehidupan tertentu, dimana pada gilirannya yang

bersangkutan akan dapat memainkan peran dan pengaruhnya tersebut untuk menentukan corak dan arah bergulirnya roda kehidupan. Keterlibatan dalam penggalangan massa misalnya, mereka mempunyai kemampuan masing-masing. Sebagai kelompok elit dalam kehidupan masyarakat, kiai mampu menggerakkan kesadaran masyarakat dalam menentukan pilihan. Hal ini dikarenakan, pola hubungan kiai dan santri yang sangat erat merupakan faktor penting dan berpengaruh dalam menentukan pilihan politik. Karenapada hakekatnya santri dan kiai tidak hanya terbatas pada saat berada dalam dunia pesantren. Keberlangsungan hubungan santri dan kiai terus berjalan tidak pernah mengalami keterputusan, bahkan setelah santri pulang ke rumah dan sudah memiliki pesantren sendiri pun hubungan santri dan kiai tidak akan pernah putus.

Apabila dari pihak Ra Momon mengumpulkan para kiai saat deklarasi pencalonannya dengan menamakan forum itu sebagai pertemuan besar kiai sekabupaten Bangkalan untuk mendukung pencalonannya, Ra Imam pun dalam deklarasinya mengundang para kiai-kiai sebagai tokoh-tokoh sentral untuk mendukung keinginannya menguasai Bangkalan. Lebih dari itu, ia juga mengadakan pertemuan-pertemuan kecil dengan kiai-kiai kampung di tiap-tiap kecamatan lewat media sholat istighasah memohon kepada Tuhan agar hasratnya menuju kursi jabatan bupati di Bangkalan dilampirkan. Sholat istighasah dilakukan semacam kegiatan bergilir terutama saat kampanye menjelang pilkada.

C. Blaterisme Struktural: Upaya Menekan dan Menghimpun Kekuatan Politik Lewat Struktur Pemerintahan

Blaterisme struktural yang dimaksud pada sub judul ini adalah ingin menjelaskan bahwa penggiringan massa dengan cara kekerasan dan intimidasi bagi orang-orang yang tidak sejalan secara politik di Bangkalan juga dilakukan melalui struktur pemerintahan. Para pejabat pemerintah dari tingkat kabupaten hingga tingkat desa dan juga para pegawai negeri sipil di Bangkalan akan mengalami kehidupan yang rumit apabila mereka tidak tunduk dengan atasan. Dalam arti bupati yang berkuasa bukan hanya menguasai ranah pemerintahan, tetapi juga ia menguasai hak politik para pegawai.

Bupati yang berkuasa, Fuad Amin memang tidak lagi bisa maju sebagai calon bupati untuk mempertahankan kekuasaannya di Bangkalan setelah ia berkuasa selama dua periode. Namun, ia telah berusaha mempertahankan kekuasaannya lewat cara lain yang diperbolehkan oleh sistem politik di Indonesia, yaitu mendelegasikan anaknya Ra Momon untuk menggantikan tampuk kekuasaannya di Bangkalan. Oleh karena itu masyarakat menganggap apabila Ra Momon terpilih, maka sebenarnya yang berkuasa tetaplah Ra Fuad sebagai pemegang kendali sepenuhnya sistem pemerintahan di Bangkalan. Sehingga melalui logika itu, seorang pejabat yang memegang kekuasaan tertinggi di Bangkalan bisa saja menggunakan kekuatan itu untuk menekan, meregulasi berbagai macam aturan yang menguntungkan penguasa. Salah satu intervensi terhadap pegawai yang disinyalir kental dengan nuansa politik tersebut misalnya saat menjelang pilkada bupati memutasi sekitar 88 pejabat di Bangkalan (Merdeka.com 11 Juli 2012). Para pejabat yang terkena mutasi tidak

dapat melakukan penolakan karena merupakan hak dari bupati untuk mengganti siapapun yang mereka mau. Seringkali para pemangku jabatan tertinggi berdalih ingin melakukan penyegaran terhadap kenerja para pegawainya, namun pergantian pejabat saat-saat mendekati pilkada, secara politis dapat dicurigai berkaitan dengan pilkada, dalam arti mereka secara politik dianggap bersebrangan dengan politik penguasa pemerintahan di Bangkalan. Para pejabat yang termasuk sebagai pegawai negeri sipil, meskipun tidak diperbolehkan masuk ke dalam politik praktis, misalnya berafiliasi langsung dengan partai politik dan mendukung secara terang-terangan calon-calon tertentu, namun mereka mempunyai hak politik untuk memilih pemimpin layaknya masyarakat pada umumnya, tidak seperti TNI/Polri yang dilarang mengikuti penyelenggaraan pemilu.

Kekerasan dan intimidasi terhadap pegawai di tingkatan kabupaten Bangkalan seakan menjadi rahasia umum di mana masyarakat dan para pegawai bersangkutan tidak punya daya bahkan memperbincangkannya pun mereka terkesan waspada terutama menjelang pilkada. Sejumlah fakta menunjukkan bahwa menjelang pilkada Ra Fuad secara sembunyi-sembunyi juga melakukan mutasi di lingkungan Dinas Kesehatan. Setidaknya beberapa pejabat dan kepala puskesmas dimutasi (Madura Corner, 25 November 2012).

Kekuasaan menurutnya adalah sebuah relasi yang tidak seimbang. Relasi yang tidak seimbang ini merupakan relasi yang eksploitatif dan represif karena penguasa menaruh kepercayaan pada kekuatan. Karena itu menurut Galtung kekuasaan adalah konsep yang paling dasar dan kaya

dalam politik. Kekuasaan terjadi dalam pola-pola relasi antar manusia dan negara. ia tidak terlepas dari apa yang disebut otoritas atau wewenang (Galtung, 2003). Namun konsep kekerasan Galtung tidak terfokus terhadap kekerasan yang dilakukan oleh penguasa politik, tetapi semua orang yang mempunyai kekuatan untuk melakukan kekerasan berdasarkan motif dan kepentingannya, hanya saja orang-orang yang berkuasa dalam structural politik kemungkinannya lebih besar melakukan tindakan kekerasan berdasarkan pada kepentingan politiknya. Bagi Galtung kekerasan fisik maupun psikologis dapat berdimensi personal maupun structural. Kekerasan berdimensi personal (langsung) jika ada subjek atau pelakunya (manusia konkret).

D. Kaum Blater Menekan dan Mengorganisir Massa Politik

Budaya kekerasan yang dikenal dengan Blater di Madura telah menjadi *image* sejak dulu. Kuntowijoyo (2002) menyebut, budaya kekerasan di Madura lahir akibat sumber daya alam yang tandus dan kemiskinan yang melanda pulau Madura sebagai salah satu penyebab mengapa orang Madura memilih cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Secara geneologis, Raditya (2012: 20) menguak dan mengkaitkannya dengan tindakan ekpolitasi para penguasa, bahwa fenomena kriminalitas mulai banyak terjadi dan menjadi aktifitas sosial yang kemudian mengganggu sistem perpolitikan kerajaan dan kolonial pada tahun 1840-1850an, setidaknya masyarakat Madura dipenuhi dengan teater pembunuhan di alun-alun kota. Di Sumenep misalnya, dalam satu hari terjadi setidaknya 3 kali pembunuhan. Institusi peradilan dan hukum setempat

tidak mampu menahan laju kriminalitas tersebut. Pelaku kriminalitas menganggap bahwa keadilan dan kesejahteraan sosial yang dijadikan prinsip dasar pemerintahan kerajaan dan kolonial itu pada akhirnya hanya bersifat elitis. Tidak ada hukuman yang tegas kepada para penguasa yang bertindak semena-mena terhadap rakyatnya.

Menurut Wiyata (2002: 89-159), pada dasarnya orang Madura memilih melakukan carok apabila berkaitan dengan beberapa hal berikut: 1) gangguan atas istri. Orang Madura akan mudah terpancing dan melakukan pembelaan dalam bentuk carok kalau istrinya diganggu. Begitu juga dengan adanya sikap cemburu, kalau kemudian terjadi perselingkuhan sang istri dengan orang lain. Lelaki yang berselingkuh dengan istri orang itulah yang akan menjadi sasaran dari sang suami. 2) balas dendam. Upaya melakukan pembalasan bila terdapat di antara salah satu anggota keluarga yang terbunuh. 3) mempertahankan martabat dan 4) mempertahankan harta warisan. Jadi dalam peristiwa carok motif dan sasarannya sangat jelas, yakni individu yang sedang saling berselisih paham yang sulit didamaikan karena sudah menyangkut harga diri yang terluka.

Munculnya orang kuat bernama Blater di Madura, terutama di pedesaan menguasai perpolitikan di tingkat desa. Hal ini dapat diterlusrui bahwa sebagian besar para penguasa di pedesaan, Klebun sebutan bagi jabatan tertinggi di desa-desa muncul dari kalangan Blater. Kekuatan fisik pada seorang Blater membuat mereka disegani sehingga kelompok ini mempunyai jaringan yang sangat kuat di pedesaan. Bagi masyarakat tradisional Madura, kekuatan fisik dan pengaruh keBlateran dianggap mampu

melindungi masyarakat desa dari berbagai ancaman dan keamanan suatu desa. Oleh karena itu, jabatan Klebun akan mudah jatuh ke tangan kaum Blater.

Di Bangkalan, kaum Blater disadari betul pengaruhnya dalam menentukan arah politik. Karena itu, para Blater diorganisir agar mendukung calon-calon yang maju di pilkada Bangkalan. Keterlibatan kaum Blater dalam politik praktis dapat digolongkan ke dalam dua hal: 1) kelompok Blater yang berorientasi material, dan 2) kelompok Blater yang lebih menekankan pada hubungan kultural. Kelompok yang pertama, ia bekerja untuk memenangkan kontestasi politik calon tertentu apabila ia dibayar dengan nominal tertentu. Artinya, siapa pun akan mereka dukung selama mereka mendapatkan upah politik sesuai dengan yang mereka inginkan. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Abdul Ghani di atas dan juga penelitian yang dilakukan oleh Raditya (2012).

Dalam memenangkan calon yang mereka bela, para Blater cenderung beroperasi dengan cara-cara yang sudah melekat pada diri mereka, yakni cara-cara kekerasan. Iya akan berupaya menggiring masyarakat di sekitarnya melalui pengaruhnya sebagai orang yang mempunyai kekuatan fisik. Mereka tidak segan-segan melakukan intimidasi dan bahkan melukai orang, termasuk orang-orang yang secara politik berada di pihak lawan.

Namun lepas dari itu, penguasaan kaum Blater merupakan penentu yang signifikan di akar rumput dalam rangka melakukan penggirngan fisik dan mental terhadap para pemilih. Faktor yang menjadi penting kemudian, mengapa Ra Momon mendapat dukungan yang luar biasa dari kaum Blater? Salah satu

jawabannya adalah: karena Ra Fuad Bapaknya mempunyai jaringan di kalangan Blater yang sangat kuat, bahkan ia disegani sesama Blater di Bangkalan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Ra Fuad begitu ambisius menginginkan agar anaknya menggantikan jabatannya setelah ia tidak bisa lagi menjabat karena tersandung regulasi politik yang tidak memperbolehkan seseorang pemimpin politik berkuasa hingga dua kali periode. Maka itu, anaknya Ra Momon didorong untuk maju agar ia dapat mengontrol dan tetap menguasai di Bangkalan. Meskipun ia dilahirkan secara biologis dari kalangan kiai, yakni keturunan kiai Kholil, tetapi ia juga pernah hidup di dunia keBlateran. Dunia kekerasan dan hidup sebagai preman bahkan lebih dominan. Ghani, salah seorang Blater dan juga temannya Ra Fuad menyatakan hal ini, karena mereka pernah sama-sama tertangkap dan dibui pada tahun 1980-an karena kasus kekerasan di Bangkalan (wawancara dengan Ghani, 15 Mei 2014).

Kesimpulan

Di bagian kesimpulan ini hendak mengurai poin-poin penting tentang jawaban atas persoalan penelitian sebagaimana yang tertera diatas, bagaimana penggunaan simbol dan ideologi agama sebagai alat untuk mempengaruhi massa rakyat untuk memilih calon bupati tertentu dalam pilkada Bangkalan 2012 dan apakah simbol agama bersinergi dengan "blaterisme" untuk memenangkan calon bupati dalam pilkada Bangkalan 12-12-2012. Berdasarkan data-data yang terkumpul dan analisis teoritis studi ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal di antaranya sebagai berikut:

Fenomena simbol ke-kiai-an dan blaterisme dalam pemelihan bupati di

Bangkalan mempengaruhi masyarakat untuk menentukan pilihannya. Simbol kiai yang diperankan oleh salah satu trah Kholil begitu mengakar dalam keseharian masyarakat Madura pada umumnya dan Bangkalan pada khususnya. Bahkan trah Kholil sangat diperebutkan oleh keturunannya. Selain itu blater menjadi kekuatan lain untuk mengintimidasi masyarakat. Dua dimensi *power* ini kemudian berpengaruh kepada penentuan arah perpolitikan di Bangkalan, untuk menentukan ketaatan terhadap perintah seorang kiai atau mengikuti desakan blater dengan cara intimidasi atau kekerasan yang mereka lakukan terhadap masyarakat. Perbedaan sikap politik dianggap atau bahkan diyakini sebagai sebuah pembangkangan terhadap kiai, masyarakat Bangkalan berasumsi bahwa tidak bermanfaat ilmu yang mereka dapatkan atau minimal dianggap perbuatan *cangkolang* apabila tidak mengikuti kiai. Situasi ini, sampai sekarang masih mengakar di masyarakat terlebih-lebih Bangkalan. Hati nurani dan rasionalitas masyarakat bertentangan dengan kenyataan sebenarnya, mereka mendukung dan mengikuti intruksi kiai semata-mata dimanfaatkan oleh kiai atau blater.

Sinergitas kiai dan blater untuk menentukan bupati di Bangkalan merupakan hal yang baru, dua *power* ini dimanfaatkan dan diperankan betul secara bersamaan oleh salah satu kandidat untuk menghegemoni masyarakat melalui trah keturunan kiai Kholil dan intimidasi secara struktural maupun psikis agar menentukan pilihannya terhadap salah satu calon (Makmun Ibnu Fuad-Munzdir Arofi'i). Demokrasi di kabupaten Bangkalan tidak berjalan sebagaimana mestinya, adanya

dominasi paternalisme menjadi salah satu sebabnya. Siapapun yang maju sebagai kandidat bupati Bangkalan walaupun tidak mempunyai program dan konsep

yang jelas, asalakan mempunyai kharisma sudah pasti kandidat tersebut berpeluang besar untuk memenangkan pertarungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barton, Greg. *Biografi Gus Dur; the authorized biography of abdurahman wahid*. PT Lkis Pelangi Aksara.2003.
- Galtung, Johan, *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban*. Asnawi dan Safruddin (Trans.), Surabaya: Pustaka Eureka, 2003.
- Hendarto, Heru, Mengenai konsep Hegemoni Gramsci, dalam Tim Redaksi Dyarkara (Penyut). *Diskusrsus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan* Jakarta: Gramedia Pusat Utama, 1993
- Jackson, K.D. *Tradisonal authority, islam and rebellion*. Bakerly university of California press. 1973
- Kuntowijoyo. *Sosial dalam Masyarakat Agraris: Madura 1850-1940*. Yogyakarta. Mata Bangsa.2002.
- Mansornoor, likn Arifin. *Islam In Indonesia Word; ulma of Madura, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 1990*.
- Clifford, Geertz. *The Religion of Java*. Chicago and London. The University Of Chicago.1976
- Raditya, Ardie. *Politik Keamanan Jagoan Madura*. (Jurnal Studi Pemerintahan Volume 2 Nomor 1. 2011)
- Wiyata, Latif. *Carok, Konflik, Kekerasan dan Harga Diri Orang*.2006. Yogyakarta. LKIS.
- Turmudi, Endang. *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*. Lkis Yogyakarta. 2004.
- Ja'far Muhammad, *Agama, Politik, dan Pemilu*,(www. Unisosdem.org)
- Merdeka.com 11 Juli 2012
- Madura Corner, 25 November 2012.